



Kepemimpinan Profesional di Tengah Maraknya Kasus Korupsi Dana BOS dalam Dunia Pendidikan

Misdayani Jambak^{1*}, Putri Maharani², Putri Riskiyah³, Ahmad Hasan⁴, Kasman⁵

¹⁻⁵ Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

Email: lubishasan2005@gmail.com^{1*}, misdayanijambak@gmail.com², riskiyahputri897@gmail.com³, mahranipuput@gmail.com⁴, kasman@stain.madina.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi: lubishasan2005@gmail.com

Abstract. *The increasing number of corruption cases involving School Operational Assistance (BOS) funds has become a serious challenge for the education sector in Indonesia. These cases not only undermine public trust in educational institutions but also hinder the achievement of equitable and quality education. This study aims to analyze the role of professional leadership in preventing and addressing the misuse of BOS funds within educational institutions. The research employs a qualitative approach through literature review and analysis of relevant regulations, scholarly publications, and documented corruption cases in the education sector. The findings indicate that professional leadership characterized by integrity, accountability, transparency, and strong ethical commitment plays a significant role in minimizing opportunities for corruption. Effective leaders are able to establish robust internal control systems, promote a culture of honesty, and ensure participatory financial management involving various stakeholders. Furthermore, continuous supervision and adherence to governance principles strengthen institutional resilience against financial misconduct. The study implies that strengthening leadership capacity and ethical values among educational leaders is essential for improving financial governance and fostering public confidence in educational management. Professional leadership is therefore a crucial factor in supporting clean, transparent, and sustainable education administration.*

Keywords: *Accountability; BOS Funds Management; Corruption Prevention; Educational Governance; Professional Leadership.*

Abstrak. Maraknya kasus korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam dunia pendidikan menjadi permasalahan serius yang berdampak pada menurunnya kualitas tata kelola pendidikan serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Dana BOS yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya kepemimpinan profesional dalam mencegah dan mengatasi praktik korupsi Dana BOS di lingkungan pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur, regulasi, jurnal ilmiah, dan laporan kasus yang berkaitan dengan pengelolaan Dana BOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan profesional yang berlandaskan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan bebas dari praktik korupsi. Selain itu, pemimpin yang profesional dapat membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika, meningkatkan pengawasan internal, serta mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana pendidikan. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas kepemimpinan dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan Dana BOS yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Dana BOS; Kepemimpinan Profesional; Pencegahan Korupsi; Tata Kelola Pendidikan.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi masih menjadi salah satu persoalan mendasar yang dihadapi Indonesia dalam berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan. Praktik korupsi tidak hanya terjadi pada lembaga pemerintahan yang mengelola anggaran besar, tetapi juga merambah ke institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter, moral, dan integritas generasi bangsa. Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi dalam dunia pendidikan adalah penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk membantu pendanaan operasional sekolah sehingga seluruh peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak tanpa terbebani biaya yang tinggi. Namun dalam praktiknya, berbagai kasus korupsi Dana BOS masih ditemukan di berbagai daerah, mulai dari manipulasi laporan keuangan, penggelembungan anggaran, penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, hingga pembuatan laporan fiktif untuk memperoleh keuntungan pribadi (Mulyasa, 2020).

Dana BOS memiliki posisi strategis dalam mendukung keberlangsungan pendidikan nasional karena menjadi salah satu sumber pembiayaan utama bagi sekolah. Melalui dana tersebut, sekolah dapat memenuhi kebutuhan operasional seperti pengadaan sarana pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, kegiatan ekstrakurikuler, hingga pemeliharaan fasilitas pendidikan. Besarnya dana yang dikelola oleh sekolah menjadikan program BOS rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang baik dan kepemimpinan yang profesional. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi dalam pengelolaan Dana BOS bukan hanya berkaitan dengan aspek administrasi keuangan, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala sekolah dan pengelola pendidikan (Sagala, 2018).

Kepemimpinan profesional merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel. Pemimpin pendidikan memiliki peran sentral dalam mengarahkan, mengendalikan, dan memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki sekolah digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan tidak hanya bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu pembelajaran, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan yang efektif dan bebas dari praktik penyimpangan. Dalam konteks ini, kepemimpinan profesional ditandai oleh integritas, tanggung jawab, transparansi, akuntabilitas, serta komitmen terhadap nilai-nilai etika dan hukum yang berlaku. Ketika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka peluang terjadinya korupsi dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan dapat meningkat (Wahjosumidjo, 2019).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan rendahnya integritas pemimpin menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Beberapa studi mengungkapkan bahwa praktik korupsi sering kali terjadi karena adanya konsentrasi kewenangan yang terlalu besar pada satu individu tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Selain itu, kurangnya transparansi dalam penyusunan dan pelaporan penggunaan Dana BOS menyebabkan masyarakat dan pemangku kepentingan sulit melakukan pengawasan secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana pendidikan sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam membangun sistem tata kelola yang partisipatif dan terbuka (Tilaar, 2017).

Di sisi lain, tuntutan terhadap profesionalisme kepemimpinan dalam dunia pendidikan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. *Good governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum dalam setiap proses pengelolaan organisasi, termasuk lembaga pendidikan. Sekolah sebagai institusi publik yang menerima dana dari negara wajib menerapkan prinsip-prinsip tersebut agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut tidak hanya memiliki kompetensi manajerial, tetapi juga kompetensi moral dan etika yang kuat dalam menjalankan tugas kepemimpinannya (Hasibuan, 2021).

Meningkatnya kasus korupsi Dana BOS dalam beberapa tahun terakhir menjadi indikasi bahwa masih terdapat kesenjangan antara idealitas kepemimpinan profesional dengan realitas yang terjadi di lapangan. Berbagai laporan menunjukkan bahwa sejumlah kepala sekolah dan pengelola pendidikan terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana pendidikan dengan berbagai modus operandi. Fenomena ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak pada menurunnya kualitas layanan pendidikan yang diterima peserta didik. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran justru dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, berbagai program pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal dan tujuan pembangunan sumber daya manusia menjadi terhambat (Suyanto, 2020).

Dalam perspektif manajemen pendidikan, kepemimpinan profesional tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali organisasi, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan budaya organisasi yang berintegritas. Seorang pemimpin yang memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai kejujuran akan mampu menanamkan budaya anti korupsi kepada seluruh warga sekolah. Budaya tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan sistem administrasi yang transparan, pelibatan guru dan komite sekolah dalam proses pengambilan keputusan, serta

pelaksanaan audit internal secara berkala. Dengan demikian, kepemimpinan profesional tidak hanya berorientasi pada pencapaian target organisasi, tetapi juga pada pembentukan lingkungan kerja yang bersih dan akuntabel (Priansa, 2019).

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas korupsi dalam sektor pendidikan maupun kepemimpinan pendidikan secara terpisah, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus menghubungkan peran kepemimpinan profesional dalam menghadapi maraknya kasus korupsi Dana BOS. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek hukum, pengawasan, atau administrasi keuangan, sementara kajian yang menyoroti dimensi kepemimpinan sebagai faktor pencegahan korupsi masih relatif terbatas. Padahal, kepemimpinan merupakan elemen yang sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi sistem tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana kepemimpinan profesional dapat menjadi solusi strategis dalam mengatasi berbagai bentuk penyimpangan Dana BOS di lingkungan pendidikan (Daryanto, 2018).

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang mengkaji hubungan antara kepemimpinan profesional dan upaya pencegahan korupsi Dana BOS dalam konteks tata kelola pendidikan modern. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek administratif pengelolaan dana pendidikan, tetapi juga menyoroti peran nilai-nilai integritas, etika kepemimpinan, akuntabilitas, dan transparansi sebagai fondasi utama dalam membangun sistem pendidikan yang bersih dari praktik korupsi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai pentingnya penguatan kapasitas kepemimpinan sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi di sektor pendidikan.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan masa depan bangsa. Apabila korupsi terus terjadi dalam pengelolaan Dana BOS, maka tujuan pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan akan sulit tercapai. Selain itu, praktik korupsi yang terjadi di lingkungan pendidikan dapat memberikan contoh buruk bagi peserta didik dan berpotensi melemahkan nilai-nilai moral yang seharusnya ditanamkan melalui proses pendidikan. Oleh karena itu, upaya memperkuat kepemimpinan profesional menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang berintegritas dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan profesional dalam menghadapi maraknya kasus korupsi Dana BOS di dunia pendidikan. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi karakteristik kepemimpinan yang mampu mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan serta

menjelaskan strategi yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian manajemen pendidikan sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pemimpin pendidikan dalam membangun tata kelola sekolah yang profesional, transparan, dan bebas dari korupsi.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kepemimpinan Profesional

Kepemimpinan profesional merupakan kemampuan seorang pemimpin dalam menjalankan fungsi manajerial dan kepemimpinannya berdasarkan kompetensi, integritas, tanggung jawab, serta standar etika yang tinggi. Dalam konteks pendidikan, kepemimpinan profesional tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan akademik, tetapi juga mencakup kemampuan mengelola sumber daya sekolah secara efektif dan akuntabel. Kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan dituntut mampu menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sehingga dapat menciptakan budaya organisasi yang sehat dan bebas dari praktik korupsi. Kepemimpinan profesional menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang berkualitas dan berintegritas (Kartono, 2016).

Teori Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Akuntabilitas merupakan kewajiban individu atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang memiliki hak untuk mengetahui dan menilai kinerjanya. Dalam pengelolaan Dana BOS, prinsip akuntabilitas menuntut adanya pelaporan keuangan yang transparan, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan serta meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntabilitas yang kuat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan dana pendidikan (Mardiasmo, 2018).

Teori Good Governance dalam Pendidikan

Konsep good governance menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan organisasi publik. Dalam dunia pendidikan, prinsip-prinsip good governance menjadi pedoman dalam mengelola sumber daya pendidikan agar dapat digunakan secara optimal dan bertanggung jawab. Pengelolaan Dana BOS yang menerapkan prinsip good governance akan melibatkan berbagai

pemangku kepentingan, seperti guru, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi penggunaan dana. Dengan demikian, peluang terjadinya korupsi dapat ditekan melalui mekanisme pengawasan yang lebih terbuka dan partisipatif (Sedarmayanti, 2017).

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas tata kelola keuangan di lembaga pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh berbagai akademisi menemukan bahwa sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan tingkat integritas dan kompetensi manajerial yang tinggi cenderung memiliki sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Sebaliknya, lemahnya pengawasan serta rendahnya komitmen etika pemimpin sering menjadi faktor penyebab munculnya berbagai bentuk penyimpangan dana pendidikan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan profesional merupakan faktor penting dalam mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan sekolah (Rohiat, 2020).

Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa maraknya kasus korupsi Dana BOS tidak hanya disebabkan oleh kelemahan sistem administrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan dalam lembaga pendidikan. Kepemimpinan profesional yang didukung oleh integritas, transparansi, akuntabilitas, dan penerapan prinsip good governance diyakini mampu memperkuat sistem pengawasan serta mendorong pengelolaan dana yang lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat profesionalisme kepemimpinan yang dimiliki kepala sekolah, maka semakin kecil peluang terjadinya penyalahgunaan Dana BOS. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar dalam menganalisis hubungan antara kepemimpinan profesional dan upaya pencegahan korupsi dalam dunia pendidikan (Usman, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Desain penelitian dipilih untuk menganalisis secara mendalam peran kepemimpinan profesional dalam menghadapi maraknya kasus korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di dunia pendidikan. Sumber data yang digunakan terdiri atas data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga pemerintah, serta dokumen lain yang relevan dengan tema kepemimpinan pendidikan, tata kelola keuangan sekolah, dan pencegahan korupsi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan objek kajian.

Populasi penelitian mencakup seluruh literatur yang membahas kepemimpinan profesional dan pengelolaan Dana BOS, sedangkan sampel penelitian ditentukan secara purposive dengan memilih sumber-sumber yang memiliki relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan informasi sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai informasi yang diperoleh dari sumber data untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kepemimpinan profesional dan upaya pencegahan korupsi Dana BOS. Model penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dengan menempatkan kepemimpinan profesional sebagai variabel konseptual yang memengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana pendidikan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, hubungan, dan implikasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi penguatan tata kelola pendidikan yang berintegritas. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi ilmiah yang menggambarkan kontribusi kepemimpinan profesional terhadap pencegahan praktik korupsi dalam pengelolaan Dana BOS.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, regulasi mengenai Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta berbagai publikasi yang membahas kepemimpinan pendidikan dan praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan sekolah. Proses pengumpulan data dilakukan selama periode penelitian dengan menelaah berbagai sumber yang relevan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai hubungan antara kepemimpinan profesional dan upaya pencegahan korupsi Dana BOS. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi pola-pola yang menunjukkan peran kepemimpinan dalam mewujudkan tata kelola keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa sebagian besar kasus penyalahgunaan Dana BOS terjadi akibat lemahnya pengawasan internal, rendahnya transparansi pengelolaan keuangan, serta kurang optimalnya penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan profesional. Di sisi lain, sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan tingkat integritas tinggi cenderung memiliki sistem administrasi dan pengelolaan dana yang lebih tertib serta melibatkan berbagai

pihak dalam proses pengambilan keputusan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan profesional memiliki kontribusi yang signifikan dalam menciptakan budaya organisasi yang berorientasi pada akuntabilitas dan pencegahan korupsi (Komariah, 2018).

Tabel 1. Faktor Penyebab Korupsi Dana BOS di Lingkungan Pendidikan.

No	Faktor Penyebab	Dampak yang Ditimbulkan
1	Lemahnya pengawasan internal	Meningkatnya peluang penyalahgunaan dana
2	Rendahnya transparansi anggaran	Sulitnya kontrol masyarakat
3	Kurangnya integritas pemimpin	Terjadinya manipulasi laporan keuangan
4	Rendahnya partisipasi stakeholder	Minimnya pengawasan eksternal
5	Budaya organisasi yang permisif	Meningkatnya risiko korupsi

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2026

Tabel 1 menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan menjadi salah satu aspek yang paling menentukan dalam mencegah terjadinya korupsi Dana BOS. Kepemimpinan yang tidak profesional dapat memperbesar peluang terjadinya penyimpangan, sedangkan kepemimpinan yang berintegritas mampu memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola keuangan sekolah.

Pembahasan

Kepemimpinan Profesional sebagai Fondasi Tata Kelola Pendidikan yang Bersih

Kepemimpinan profesional merupakan elemen utama dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel. Dalam organisasi pendidikan, kepala sekolah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengelola sumber daya manusia, sarana prasarana, serta keuangan sekolah. Oleh karena itu, kualitas kepemimpinan yang dimiliki kepala sekolah sangat menentukan arah dan budaya organisasi yang berkembang di lingkungan sekolah.

Pemimpin yang profesional tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang mampu membangun budaya kerja berbasis integritas. Integritas menjadi modal utama dalam mencegah berbagai bentuk penyimpangan anggaran karena pemimpin yang memiliki integritas tinggi akan selalu berupaya menjalankan tugas sesuai aturan dan prinsip moral yang berlaku. Integritas tersebut kemudian tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang diambil, termasuk dalam pengelolaan Dana BOS yang harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (Mulyono, 2019).

Dalam perspektif manajemen pendidikan, kepemimpinan profesional ditandai oleh kemampuan dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara efektif. Fungsi-fungsi tersebut sangat penting dalam memastikan bahwa setiap penggunaan Dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kepemimpinan profesional menjadi instrumen

penting dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat dan bebas dari praktik korupsi.

Peran Transparansi dalam Pencegahan Korupsi Dana BOS

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pendidikan yang baik. Transparansi memungkinkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dana pendidikan sehingga potensi penyalahgunaan dapat diminimalkan. Dalam konteks Dana BOS, transparansi dapat diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang jelas, publikasi penggunaan anggaran, serta keterbukaan informasi kepada guru, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan transparansi secara konsisten memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi dibandingkan sekolah yang cenderung tertutup dalam pengelolaan anggaran. Transparansi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan dan kritik terhadap penggunaan dana pendidikan. Dengan adanya keterbukaan informasi, peluang untuk melakukan manipulasi laporan keuangan menjadi semakin kecil karena setiap transaksi dapat diawasi oleh berbagai pihak (Fattah, 2017).

Selain itu, transparansi mampu menciptakan budaya organisasi yang menjunjung tinggi kejujuran. Ketika seluruh informasi mengenai penggunaan Dana BOS dapat diakses secara terbuka, maka setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan dana akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter bagi seluruh warga sekolah.

a. Transparansi dalam Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran yang transparan memungkinkan seluruh pemangku kepentingan mengetahui prioritas penggunaan Dana BOS. Melalui mekanisme musyawarah dan keterbukaan informasi, keputusan mengenai penggunaan dana dapat dilakukan secara objektif dan sesuai kebutuhan sekolah.

b. Transparansi dalam Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan yang terbuka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi maupun penyalahgunaan dana pendidikan.

c. Transparansi sebagai Budaya Organisasi

Keterbukaan informasi yang dilakukan secara berkelanjutan akan membentuk budaya organisasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan akuntabilitas.

Akuntabilitas sebagai Instrumen Pengendalian Keuangan Sekolah

Akuntabilitas merupakan prinsip yang mengharuskan setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral. Dalam pengelolaan Dana BOS, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga menyangkut kesesuaian penggunaan dana dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kepala sekolah yang memiliki komitmen terhadap akuntabilitas akan memastikan bahwa setiap pengeluaran dana didukung oleh bukti yang sah dan dicatat secara sistematis. Dengan demikian, seluruh aktivitas keuangan dapat ditelusuri apabila diperlukan audit atau evaluasi. Penerapan akuntabilitas yang baik juga mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran karena setiap program yang dilaksanakan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas (Nawawi, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan sistem akuntabilitas secara konsisten memiliki risiko korupsi yang lebih rendah dibandingkan sekolah yang tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang kuat. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu faktor utama dalam pencegahan korupsi sektor publik.

Partisipasi Stakeholder dalam Pengawasan Dana BOS

Keberhasilan pengelolaan Dana BOS tidak hanya bergantung pada kepala sekolah, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan. Partisipasi stakeholder menjadi penting karena dapat memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS meliputi guru, komite sekolah, orang tua peserta didik, masyarakat, serta instansi pemerintah terkait. Melalui keterlibatan berbagai pihak tersebut, pengelolaan dana menjadi lebih terbuka dan akuntabel karena setiap keputusan harus mempertimbangkan berbagai perspektif yang berbeda (Suhardan, 2018).

Partisipasi stakeholder juga berfungsi sebagai bentuk kontrol eksternal terhadap penggunaan Dana BOS. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap informasi keuangan sekolah, maka potensi terjadinya penyimpangan dapat dideteksi lebih awal. Oleh karena itu, penguatan partisipasi stakeholder menjadi salah satu strategi penting dalam membangun sistem pengelolaan dana pendidikan yang bersih dan transparan.

Kesesuaian dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan berbagai penelitian terdahulu yang menegaskan pentingnya kepemimpinan profesional dalam menciptakan tata kelola organisasi yang efektif. Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa integritas pemimpin memiliki

hubungan yang erat dengan tingkat akuntabilitas organisasi. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa kepala sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan profesional mampu meminimalkan risiko korupsi Dana BOS (Bafadal, 2019).

Selain itu, penelitian ini juga mendukung hasil kajian yang menyatakan bahwa transparansi dan partisipasi stakeholder merupakan faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan anggaran publik. Namun demikian, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada hubungan antara kepemimpinan profesional dan pengelolaan Dana BOS sehingga memberikan kontribusi baru dalam kajian manajemen pendidikan.

Implikasi Penelitian

Implikasi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep bahwa kepemimpinan profesional memiliki peran strategis dalam membangun tata kelola pendidikan yang berintegritas. Hasil penelitian menegaskan bahwa integritas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi merupakan komponen utama yang harus dimiliki oleh pemimpin pendidikan untuk mencegah terjadinya korupsi Dana BOS.

Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada kepala sekolah dan pengelola pendidikan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan melalui pelatihan manajemen keuangan, pendidikan antikorupsi, dan penguatan sistem pengawasan internal. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme audit serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan Dana BOS. Dengan demikian, tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi dapat terwujud secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan profesional memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan menghadapi maraknya kasus korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di dunia pendidikan. Kepemimpinan yang berlandaskan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab terbukti mampu memperkuat tata kelola keuangan sekolah sehingga penggunaan Dana BOS dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance, pengawasan internal yang efektif, serta keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor pendukung dalam menciptakan pengelolaan dana pendidikan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis peran kepemimpinan profesional dalam upaya

pengecahan korupsi Dana BOS dapat terjawab melalui temuan bahwa kualitas kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap terciptanya budaya organisasi yang berintegritas dan bebas dari praktik penyimpangan keuangan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah, dinas pendidikan, dan lembaga pendidikan terus memperkuat kompetensi kepemimpinan kepala sekolah melalui pelatihan manajemen, tata kelola keuangan, serta pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan. Selain itu, perlu ditingkatkan sistem pengawasan dan transparansi pengelolaan Dana BOS dengan melibatkan komite sekolah, orang tua, dan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial yang efektif. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan sehingga belum memperoleh data empiris secara langsung dari lapangan. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif lapangan, atau metode campuran untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai implementasi kepemimpinan profesional dalam pengelolaan Dana BOS di berbagai jenjang dan wilayah pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

- Bafadal, I. (2019). *Manajemen peningkatan mutu sekolah dasar: Dari sentralisasi menuju desentralisasi*. Bumi Aksara.
- Daryanto. (2022). *Administrasi dan manajemen sekolah*. Rineka Cipta.
- Fattah, N. (2021). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 28(2), 145–156.
- Hasibuan, M. S. P. (2021). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara. <https://doi.org/10.31219/osf.io/45wym>
- Kartono, K. (2022). *Pemimpin dan kepemimpinan*. Rajawali Pers.
- Komariah, A., & Triatna, C. (2021). Kepemimpinan pendidikan berbasis integritas dalam penguatan tata kelola sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(1), 35–47.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Mulyasa, E. (2020). *Menjadi kepala sekolah profesional*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. (2023). Penguatan kepemimpinan kepala sekolah dalam pencegahan korupsi dana pendidikan. *Jurnal Kependidikan*, 11(2), 210–223.
- Nawawi, H. (2020). *Manajemen strategik organisasi non profit bidang pemerintahan*. Gadjah Mada University Press.
- Priansa, D. J. (2022). *Manajemen supervisi dan kepemimpinan kepala sekolah*. Alfabeta.
- Rohiat. (2020). *Manajemen sekolah: Teori dasar dan praktik*. Refika Aditama.
- Sagala, S. (2022). *Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan*. Alfabeta.
- Sedarmayanti. (2021). *Good governance dan good corporate governance*. Mandar Maju.

- Suhardan, D. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana BOS di sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 27(3), 201–214.
- Suryana, A. (2023). Implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS pada satuan pendidikan. *Jurnal Keuangan Publik*, 8(1), 55–69.
- Suyanto. (2020). Tata kelola pendidikan dan tantangan korupsi dana sekolah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 5(2), 88–102.
- Tilaar, H. A. R. (2022). *Manajemen pendidikan nasional: Kajian pendidikan masa depan*. Rineka Cipta.
- Usman, H. (2021). *Manajemen: Teori, praktik, dan riset pendidikan*. Bumi Aksara.
- Wahjosumidjo. (2023). *Kepemimpinan kepala sekolah: Tinjauan teoretik dan permasalahannya*. RajaGrafindo Persada.
- Widodo, J. (2024). Kepemimpinan profesional dan efektivitas pengelolaan keuangan sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 16(1), 1–15.
- Yuliana, R., & Prasetyo, B. (2024). Pencegahan korupsi dana BOS melalui penguatan sistem pengawasan internal sekolah. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Tata Kelola Publik*, 4(1), 120–129.
- Zainuddin, M. (2023). Pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 167–181.